



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jendela Informasi yang memuat peraturan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi informasi status peraturan, abstrak dan katalog peraturan

Sekilas JDIH

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

PENDAHULUAN

Pada Tahun 1999 terbit sebuah Kebijakan Nasional terkait pelaksanaan JDIH, yaitu Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam Lembaran Negara No. 135. Kemudian dalam upaya menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi maka Keputusan Presiden tersebut direvitalisasi dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH yang terdiri dari:

1. Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada:
 - a. Kementerian Negara;
 - b. Sekretariat Lembaga Negara;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;

3. Lembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Selain itu, amanat pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menegaskan bahwa tujuan dari JDHN adalah:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan penyajian informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta

Keputusan Menteri LHK Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan.

Tujuan dilaksanakannya pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Mendukung peningkatan kualitas dalam transparansi informasi hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
5. Tersedianya akses informasi hukum bagi semua warga negara sebagai wujud *conditio sine quanon* dalam mewujudkan supremasi hukum khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai indikator keluaran yang diharapkan dari terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah terwujudnya peningkatan pemahaman pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta masyarakat umum terhadap peraturan perundang-undangan.

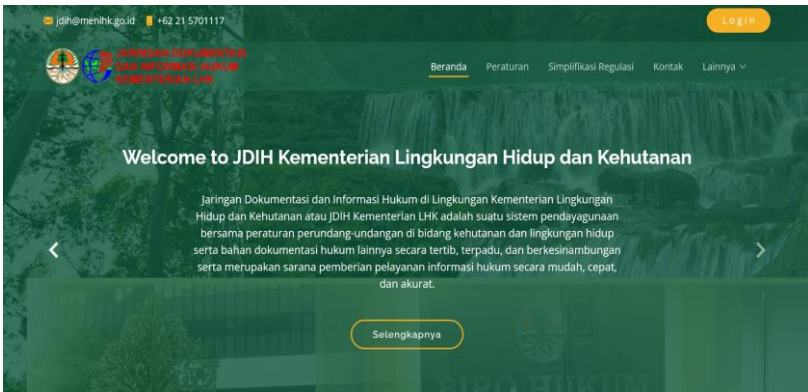
Kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di website ini dapat terus disempurnakan.

Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara historis melekat erat dalam mendukung pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan serta belum tersedianya akses informasi hukum yang efektif, sehingga dokumen/informasi hukum sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan utama maupun operasional institusi Kementerian, seperti: informasi abstrak, katalog maupun metadata dari tiap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

TAMPILAN JENDELA APLIKASI



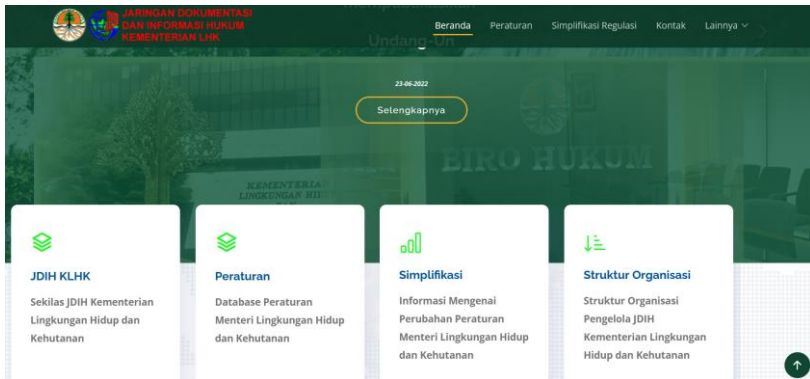
Menu Beranda

Informasi dalam Beranda meliputi artikel info dan berita yang dipublikasikan oleh Biro Hukum KLHK sebagai pengelola dan administrator aplikasi JDIIH Kementerian.

Menu ini sebagai home based dari aplikasi, dan memiliki 4 Icon Box yang terdiri dari fitur:

1. Sekilas JDIIH KLHK
2. Peraturan
3. Simplifikasi
4. Struktur Organisasi

Dengan bentuk tampilan sebagai berikut:



Jendela Beranda hanya menampilkan secara *Glossy* dari informasi artikel berita maupun peraturan yang baru saja dimuat.

Menu Peraturan



Dalam menu (front) Peraturan, ditampilkan secara terbatas 2 kolom peraturan yang terdiri dari kolom peraturan Terbaru, dan kolom peraturan Terpopuler. Kolom peraturan Terpopuler adalah peraturan yang paling banyak di akses (hit-count tertinggi).

Selanjutnya untuk pencarian peraturan yang lebih detail, maka bias melalui fitur penelusuran yang tersedia dalam bentuk tombol “Penelusuran”.

Tampilan dari Jendela Pencapaian Peraturan:

The screenshot shows the 'PRODUK HUKUM' search interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Beranda', 'Peraturan', 'Simplifikasi Regulasi', 'Kontak', and 'Lainnya'. Below the navigation bar, the title 'PRODUK HUKUM' is displayed. The search form includes two columns of input fields: 'Nomor' (with a sub-field for 'Nomor') and 'Tahun' (with a sub-field for 'Tahun') on the left; and 'Status' (with a dropdown menu for 'Jenis Produk Hukum') and 'Tentang' (with a sub-field for 'Tentang') on the right. A green 'CARI PERATURAN' button is located at the bottom right of the form. Below the form, there is a sorting option: 'Urutkan dari: Terbaru Oterlama'.

Sesuai tampilan di atas, maka Pencarian Peraturan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yang disediakan:

- Berdasarkan Nomor Peraturan;
- Tahun Peraturan; dan/atau
- Judul Peraturan

Sedangkan aplikasi juga menyediakan kategori pencarian peraturan yang akan dicari sesuai taksonomi peraturan, meliputi:

- a. Undang-undang/PERPU
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Presiden
- d. Keputusan Presiden
- e. Intruksi Presiden
- f. Peraturan Menteri
- g. Keputusan Menteri
- h. Peraturan Eselon I
- i. Surat Edaran

j. Putusan Perkara

Sebagai contoh, diilustrasikan pencarian mengenai peraturan dengan kriteria: nomor peraturan 10, maka hasil dari pencarian aplikasi adalah sebagai berikut:

HASIL Pencarian

NOMOR	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG	STATUS	
PERMEN LHK. 12/2022	26-07-2022	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim	✓ berlaku	DOWNLOAD PDF
PERMEN LHK. 12/2021	19-05-2021	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium	✓ berlaku	DOWNLOAD PDF
PERMEN LHK. 12/2020	14-05-2020	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	✗ tidak berlaku	DOWNLOAD PDF
PERMEN LHK. 12/2018	2018	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Peryyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut	✗ tidak berlaku	DOWNLOAD PDF
PERMEN LHK. 12/2017	2017	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	✓ berlaku	DOWNLOAD PDF

Sebelum melakukan download dari peraturan, pengguna akan ditampilkan informasi berupa Lembar Kerja Peraturan yang menginfokan status dari peraturan yang dimaksud (dicari).

Lembar Kerja Peraturan

Lembar Kerja Peraturan	
Tipe	: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Judul	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
T.E.U Badan/Pengarang No. Peraturan	: Indonesia.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :12
Jenis/Bentuk Peraturan	: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	: Permen
Tempat Penetapan	: Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	: 14-05-2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	: 05-06-2020
Sumber	: BN 2020 (569)
Subjek	: LIMBAH B3 - SETJEN
Status Peraturan	: Tidak Berlaku
Bahasa	: Indonesia
Unit Kerja	: SETJEN

Sesuai tampilan di atas, maka informasi status dari peraturan tersebut terdiri dari:

- Tipe Peraturan;
- Judul Peraturan;
- T.E.U Badan atau Pengarang;
- Jenis/Bentuk Peraturan;
- Singkatan Jenis dari Bentuk Peraturan;
- Tempat Penetapan;
- Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan;
- Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan;
- Sumber;
- Subjek;
- Status Peraturan;
- Bahasa; dan
- Unit Kerja

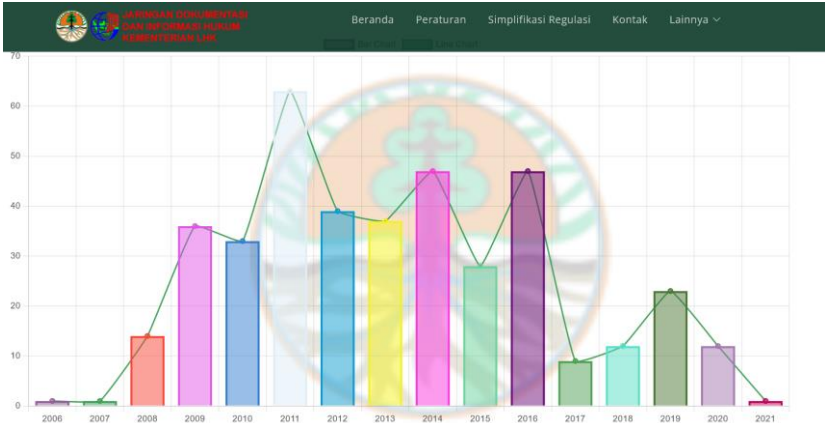
Dalam jendela “Lembar Kerja Peraturan”, terdapat tiga fungsi tambahan dalam bentuk icon, yaitu: Katalog Peraturan dan download file pdf (*softcopy*) dari peraturan tersebut.

Bila peraturan tersebut tersedia dalam format bahasa Inggris, maka dalam jendela “Lembar Kerja Peraturan” akan muncul icon “PDF download” untuk mendownload peraturan versi bahasa Inggris.

Menu Simplifikasi Regulasi

Menu ini menampilkan keseluruhan regulasi berupa peraturan menteri yang telah diterbitkan dalam kurun waktu tertentu.

Sesuai tampilan dari menu ini, (sesuai gambar di bawah):



Gambar grafik dari Simplifikasi Regulasi ini menampilkan kuantitas produk hukum berupa Peraturan Menteri yang telah diterbitkan per tahun.

Dalam Simplifikasi Regulasi selain info grafis, juga menampilkan rekap dari peraturan yang meliputi:

- Jumlah Peraturan Menteri yang telah diterbitkan
- Peraturan yang masih berlaku; dan
- Peraturan yang sudah tidak berlaku atau telah dicabut
- Tabel rincian per tahun dari peraturan menteri yang sudah tidak berlaku/telah dicabut.

Tampilan dari tabel rekap Peraturan Menteri per Tahun yang sudah tidak berlaku/ telah dicabut:

PERATURAN MENTERI TAHUN	JUMLAH PERATURAN MENTERI DICABUT (TIDAK BERLAKU)	KETERANGAN
2021	1	
2020	12	
2019	23	
2018	12	
2017	9	
2016	47	
2015	28	
2014	47	<i>belum tersedia</i>

Dalam table di atas menampilkan informasi rekap dari peraturan yang telah di cabut per tahun berikut PDF file dari ringkasan detail tiap peraturan yang telah dicabut